

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
KECAMATAN PRAYA BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan LKj-IP Kecamatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan ini merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Praya Barat pada Tahun Anggaran 2024. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasikan.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sekarang ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Kecamatan Praya Barat khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin

Praya Barat, Januari 2025

Plt. CAMAT PRAJA BARAT,



H. LALU SAMSUL RIJAL, S.IP

NIP. 197212312002121034

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas, Fungsi OPD	1
I.2 Data Kepegawaian	3
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
II.2 Rencana Kerja Tahunan	11
II.3 Indikator Kinerja Utama	11
II.2 Perjanjian Kinerja OPD tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	14
III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	19
III.4. Akuntabilitas Keuangan	21
BAB IV PENUTUP	31

Daftar Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
2. Rencana Aksi Tahun 2024
3. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 untuk penilaian Nilai SAKIP PD.
4. Laporan Hasil Pengolahan Data atas Survey Kepuasan Masyarakat.
5. Form Penilaian Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.
6. Rekap Data Gangguan Trantibum.
7. Form Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD Tahun 2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Praya Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Praya Barat Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Praya Barat menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Kantor Camat Praya Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 3 (Tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Praya Barat. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	200	123	61,19%
1.1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83	97,6%
1.2	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang dan Mandiri di Kecamatan	100	85	85%
1.3	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum diwilayah desa	60	55	91,6%

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Kantor Camat Praya Barat belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satu faktor yang terpenting adalah Faktor SDM dan Anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Praya Barat

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka **meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/kelurahan.**

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 12 Kecamatan yang ada yang memiliki Tugas Pokok menurut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, disebutkan bahwa **Tugas Pokok** Kecamatan adalah :

1. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan kecamatan mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Data Kepegawaian

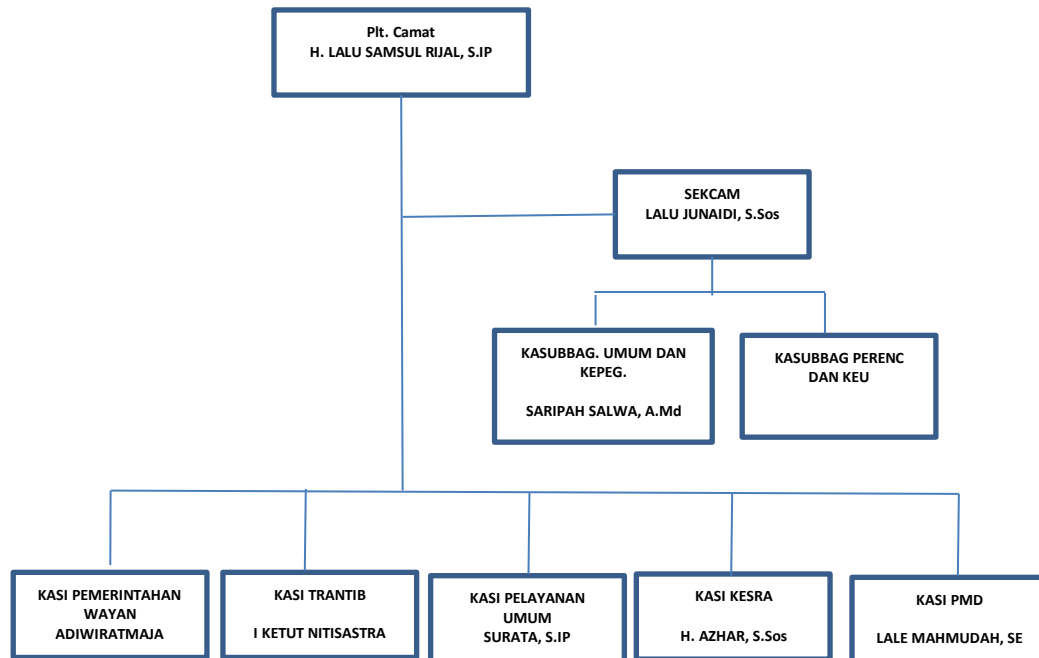
Jumlah Pegawai di kecamatan Praya Barat, Menurut keadaan sampai bulan Desember 2024 Kecamatan Praya Barat mempunyai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang.

DATA KEPEGAWAIAN KECAMATAN PRAYA BARAT PER DESEMBER 2024

I. JUMLAH PEJABAT MENURUT ESELON		
NO	ESELON	JUMLAH
	IIIA	
	IIIB	1
	IVA	5
	IVB	1
	JUMLAH	
II. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN		
NO	GOLONGAN	JUMLAH
	Pembina Tk. I (Iva)	
	Pembina (IV a)	
	Penata Tk I (IIId)	6
	Penata (IIIC)	1
	Penata Muda Tk. I (IIIb)	2
	Penata Muda	
	Pengatur Tk. I (IIId)	5
	Pengatur (IIC)	2
	Pengatur Muda Tk. I (IIb)	
	Pengatur Muda (IIa)	
	JUMLAH	16
III. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR		
NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
	S2	
	S1	6
	D3	1
	SLTA	9
	JUMLAH	16

1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Praya Barat

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: ” **MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA**”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Kantor Camat Praya Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke – 3 yaitu : **“Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Kantor Camat Praya Barat 2022-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Camat Praya Barat Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan dari Kecamatan adalah **“Meningkatnya Kinerja Kecamatan”**

2.2.1 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

KETERKAITAN (INTERFLASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
KANTOR CAMAT PRAJA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Kinerja Kecamatan		Nilai Kinerja Camat
1.1		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
1.2		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang dan Mandiri di Kecamatan
1.3		Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum diwilayah desa

2.3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

VISI :	MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA			
MISI 3 :	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2 Meningkatkan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan
				Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

2.4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024, Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

Kode	SKPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,036,135,944.00
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,661,900.00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,860,400.00
	Belanja Operasi	9,450,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,500.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,512,900.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	557,500.00
	Belanja Operasi	557,500.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,500.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210,000.00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,081,000.00
	Belanja Operasi	1,081,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	556,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525,000.00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,428,500.00
	Belanja Operasi	1,428,500.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	903,500.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,564,500.00
	Belanja Operasi	4,564,500.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	764,500.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,500,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400,000.00
	Belanja Operasi	400,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	

		400,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,770,000.00
	Belanja Operasi	8,770,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,170,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00
	-Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,067,940.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,266,220.00
	Belanja Operasi	12,266,220.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12,266,220.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,097,320.00
	Belanja Modal	21,097,320.00
	-Belanja modal pengadaan Komputer	21,097,320.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,588,400.00
	Belanja Operasi	21,588,400.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,450,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	778,400.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,116,000.00
	Belanja Operasi	21,116,000.00
	-Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,616,000.00
	-Belanja Bimbingan Teknis	4,500,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,457,400.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,457,400.00
	Belanja Operasi	28,457,400.00
	-Belanja Tagihan Air	4,095,000.00
	-Belanja Tagihan Listrik	10,562,400.00
	-Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6,900,000.00
	-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,900,000.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,480,356.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64,601,204.00

	Belanja Operasi	64,601,204.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58,380,000.00
	-Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,721,204.00
	-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3,500,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,879,152.00
	Belanja Modal	17,879,152.00
	-Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17,051,530.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	827,622.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,830,468,348.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,762,909,524.00
	Belanja Operasi	1,874,667,882.00
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,874,267,882.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,625,900.00
	Belanja Operasi	4,625,900.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,668,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	457,900.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62,932,924.00
	Belanja Operasi	62,932,924.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,790,400.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20,638,524.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,600,000.00
	-Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000.00
	-Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12,000,000.00
	-Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,814,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,000,000.00
	-Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,890,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,439,470.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,690,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,690,000.00

	Belanja Operasi	13,690,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,950,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,200,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540,000.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75,749,470.00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75,749,470.00
	Belanja Operasi	75,749,470.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17,569,600.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,250,000.00
	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14,400,000.00
	-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	317,880.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,809,870.00
	-Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	402,120.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,383,800.00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42,383,800.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42,383,800.00
	Belanja Operasi	42,383,800.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23,352,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00
	-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12,000,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,531,800.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	388,249,818.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	388,249,818.00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	388,249,818.00
	Belanja Operasi	388,249,818.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11,120,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,910,738.00
	-Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	62,298,480.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154,400,000.00
	-Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16,500,000.00

	-Belanja Jasa Tata Rias	11,598,300.00
	-Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22,636,668.00
	-Belanja Sosialisasi	26,400,000.00
	-Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33,600,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,309,872.00
	-Belanja Pakaian Paskibraka	40,475,760.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38,752,760.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38,752,760.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,727,960.00
	Belanja Operasi	12,727,960.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,560,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,727,960.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,440,000.00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,853,000.00
	Belanja Operasi	12,853,000.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,725,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,288,000.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,840,000.00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13,171,800.00
	Belanja Operasi	13,171,800.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,672,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,499,800.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,574,790.00
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21,574,790.00
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21,574,790.00
	Belanja Operasi	21,574,790.00
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,946,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,410,000.00
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,218,312.00
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	

		6,240,000.00
	-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	525,000.00
	-Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,955,478.00
	-Belanja Sosialisasi	7,280,000.00

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Praya Barat berdasarkan Renja Tahun Anggaran 2024. **(Terlampir).**

Rencana Kerja Tahunan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran pertriwulan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah dibuat.

Rencana Aksi Tahun 2024 terlampir.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Barat sesuai dengan dokumen Renstra Kantor Camat Praya Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PRAJA BARAT TAHUNA ANGGARAN 2024

TABEL T-C.28

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PRAJA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
			2021	2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Indikator Tujuan dan Sasaran								
1	Persentase penurunan gangguan trantibum	0%	20%	20%	25%	25%	30%	35%	35%
2	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
3	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Nilai Kinerja Camat	0	170	180	200	210	215	246	246
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	79	80	81	83	86	89	89
6	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	0%	70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%

	Indikator Program								
1	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	B	B	B	B	B
2	Prosentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Porsentase usulan masyarakat yang disetujui	0%	15%	15%	15%	20%	20%	25%	25%
4	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	0%	85%	90%	93%	95%	97%	100%	100%
5	Persentasi pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	0%	55%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
6	persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Renstra 2021 - 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian ketiga renstra Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

URAIAN URUSAN, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,036,135,944	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,439,470	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,574,790	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,383,800	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	388,249,818	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38,752,760	
Jumlah Belanja	2,616,536,582	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2,616,536,582,- (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan puluh Dua Rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

n

tuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK

2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Kantor Camat Praya Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Praya Barat Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. SASARAN NO 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan

Sasaran No 1 **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan** di ukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Predikat/Nilai SAKIP PD**
Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	TARGET AKHIR RENSTRA	SUMBER DATA
Perdikat /Nilai Sakip OPD	Predikat	B	B	61,19%	C	B	Inspektorat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan**” dengan indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” pada Kantor Camat Praya Barat menghasilkan capaian kinerja sebesar 61,19 % dengan kriteria “**Baik**”.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan

1. Bahwa realisasi capaian predikat telah memenuhi target atau sesuai target
2. Realisasi capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan di tahun sekarang
3. Realisasi capaian tahun ini meningkat dibanding realisasi tahun menengah dari renja
4. Hal ini disebabkan oleh faktor peningkatan SDM dan sarana penting yang memadai
5. Pentingnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/bakat untuk menunjang tercapaian target predikat kinerja baik

6. Pentingnya pembinaan dan pelatihan untuk pegawai untuk meningkatkan SDM dan peningkatan pengawasan sarana dan prasarana kantor.

Adapun penjelasan pencapaian indikator meliputi:

a. Indikator “Predikat/Nilai SAKIP PD”.

Capaian indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” tahun 2024 adalah “**Baik**” dari target Predikat B dan berada pada interval predikat Baik sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” adalah CUKUP, berada pada interval CUKUP .

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Barat pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” :

$$\frac{61,19}{61,19} \times 100\% = 100 \%$$

- ✓ “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” merupakan Indikator ke-1 dari Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Barat.
- ✓ Jenis Penilaian di berikan oleh Inspektorat setiap Tahun melalui E-SAKIP Review.
- ✓ Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terlampir.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran No 2 adalah “**Meningkatnya kualitas layanan publik**” tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu: **Indeks Kepuasan Masyarakat**. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	TARGET AKHIR RENSTRA	SUMBER DATA
Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	85	83	97,6%	83	85	Kasi Pelayanan Umum

Capaian indikator “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat “ tahun 2024 sebesar 83 poin atau 97,6 % dari Target sebesar 85 poin sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat” sebesar 82 Poin atau sebesar 95.5 % dengan kriteria “Baik” dari target sebesar 83 poin.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Rencana tingkat pencapaian rencana

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Barat pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan :

$$\frac{83}{85} \times 100\% = 97,6\%$$

- ✓ Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat merupakan indikator Sasaran ke 2 yang dimasukkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026.
- ✓ SOP pelaksanaan kegiatan belum di buat sesuai Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal lain yang menjadi perhatian adalah Sumber daya aparatur masih kurang memadai dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang di gunakan Memuat karaktarestik populasi, keterwakilan anggota sampel dan jumlah responden, selain itu disajikan jumlah responden yang berhasil di kumpulkan dan yang berhasil di tindak lanjuti. Kuisioner survey langsung diberikan kepada penerima layanan

kecuali bagi orang tua yang kurang bisa dalam hal baca tulis, petugas survey langsung menanyakan dalam bentuk wawancara. ***Pengolahan data hasil survey terlampir.***

1. Bahwa realisasi capaian predikat tidak memenuhi target atau masih dibawah target
2. Realisasi capaian tahun sebelumnya masih Lebih Tinggi dengan tahun sekarang
3. Realisasi capaian tahun ini menurun dibanding realisasi tahun menengah dari renja
4. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM dan sarana penting yang kurang memadai seperti ketersediaan Blanko dan gangguan pada jaringan aplikasi.
5. Pentingnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/bakat untuk menunjang tercapaian target predikat kinerja baik
6. Pentingnya pembinaan dan pelatihan untuk pegawai untuk meningkatkan SDM dan peningkatan pengawasan sarana dan prasarana kantor.

3. Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan

Sasaran No 3 adalah “**Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa**” tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan.**

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	TARGET AKHIR RENSTRA	SUMBER DATA
Persentase Desa Maju diwilayah Kecamatan	Point	80	78	97.50	79	80	Kasi PMD

Capaian indikator “**Persentase Desa Maju di Kecamatan**” tahun 2024 sebesar 78% atau sebesar 97.50 % dengan kriteria “**Baik**” dari target sebesar 80 % sedangkan pada tahun 2022 untuk Indikator “**Persentase Desa Maju di Kecamatan**” sebesar 70 % atau 100 % dari Target sebesar 70 % dengan Kriteria “**Baik**” .

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Barat pada Tahun 2022 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. **Persentase Desa Maju di Kecamatan :**

$$\frac{78\%}{80\%} \times 100\% = 97.5\%$$

- ✓ **“Persentase Desa Maju di Kecamatan”** merupakan Indikator dari sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan”** yang telah dirumuskan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Jenis pendataan menggunakan form Rekap Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dievaluasi oleh Seksi PMD.
- ✓ Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan terlampir.
 1. Bahwa realisasi capaian predikat tidak memenuhi target atau masih dibawah target
 2. Realisasi capaian tahun sebelumnya masih Lebih Tinggi dengan tahun sekarang
 3. Realisasi capaian tahun ini menurun dibanding realisasi tahun menengah dari renja
 4. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM dan sarana penting yang kurang memadai
 5. Pentingnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/bakat untuk menunjang tercapaian target predikat kinerja baik
 6. Pentingnya pembinaan ,pelatihan dan pendampingan untuk pegawai untuk meningkatkan SDM dan peningkatan pengawasan sarana dan prasarana kantor.

Bahwa realisasi capaian predikat tidak memenuhi target atau masih dibawah target

- ✓ Realisasi capaian tahun sebelumnya masih Lebih Tinggi dengan tahun sekarang

- ✓ Realisasi capaian tahun ini menurun dibanding realisasi tahun menengah dari renja
- ✓ Hal ini disebabkan oleh faktor SDM dan sarana penting yang kurang memadai seperti ketersediaan Blanko dan gangguan pada jaringan aplikasi.
- ✓ Pentingnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/bakat untuk menunjang tercapaian target predikat kinerja baik
- ✓ Pentingnya pembinaan dan pelatihan untuk pegawai untuk meningkatkan SDM dan peningkatan pengawasan sarana dan prasarana kantor.

4. Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa/Kelurahan

Sasaran No 4 adalah “**Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa/Kelurahan**” tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/Kelurahan.**

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 4 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	TARGET AKHIR RENSTRA	SUMBER DATA
Persentase Pengendalian Gangguan Ketertibab Masyarakat	Point	60	55	75	55	75	Kasi Trantib

Capaian indikator “Persentase Pengendalian Gangguan Ketertibab Masyarakat” tahun 2024 sebesar 55 % atau sebesar 91,6 % dengan kriteria “**Baik**” dari target sebesar 60 % sedangkan pada tahun 2022 untuk Indikator “Persentase Pengendalian Gangguan Ketertibab Masyarakat” sebesar 55 % atau 91,6 % dari Target sebesar 60 % dengan Kriteria “**Baik**” .

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Rencana tingkat pencapaian rencana

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Barat pada Tahun 2022 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

Persentase Pengendalian Gangguan Ketertibab Masyarakat :

$$\frac{55\%}{60\%} \times 100\% = 91.67\%$$

- ✓ **“Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/Kelurahan ”** merupakan Indikator dari sasaran **“Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa/Kelurahan”** yang telah dirumuskan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Jenis pendataan menggunakan form Rekap Daftar Gangguan Trantibum di Desa dan Kelurahan setiap tahun.
- ✓ Hasil Rekap Daftar Gangguan Trantibum di Desa dan Kelurahan terlampir.

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efesiensi SDM dan Aset.

NO	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah		
			B	K	-/+
1	2	3	4		
1	Camat	12	0	1	-1
2	Sekretaris Camat	11	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1	1	0
4	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
5	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	0	1	-1
6	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
7	Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	0
8	Pengemudi	3	0	1	-1
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dann Keuangan	8	1	1	0
10	Bendahara	7	1	1	0
11	Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
12	Pengadministrasi Perencanaan dan program	5	0	1	-1
13	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1	1	0

14	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	0	1	-1
15	Pengadministrasi Pemerintahan	5	0	1	-1
16	Pengadministrasi umum	5	1	1	0
17	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1	1	0
18	Pengelola Data	6	0	1	-1
19	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	1	1	0
21	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	0	1	-1
23	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
24	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1	1	0
18	Pengelola Data Kemasyarakatan dan Kelembagaan	6	0	1	-1
25	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	0	1	-1
26	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
27	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
28	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1	1	0
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	0	1	-1
30	Pengadministrasi Perizinan	5	1	1	0
31	Pengadministrasi Kependudukan	5	0	1	-1
32	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Keterangan :

B =Bezeting

K= Kebutuhan

-/+ =Kurang Lebih

Pada tahun 2024, jumlah pegawai Kantor Camat Praya Barat sebanyak 16 orang dimana kekurangan di Kantor Camat Praya Barat sebanyak 15 pegawai. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Kantor Camat Praya Barat dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Kantor Camat Praya Barat tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Aset Kantor Camat Praya Barat Tahun 2024

No	Jenis Aset	Nilai	Jumlah Objek tiap jenis
1	KIB A	152,000,000.00	Objek Aset
2	KIB B	817,133,411.00	Objek Aset
3	KIB C	932,964,500.00	Objek Aset
4	KIB D	7,187,500.00	Objek Aset
5	KIB E		Objek Aset
	Jumlah	1,909,285,411.00	

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Nilai	Jumlah Objek tiap jenis
1	KIB A		Objek Aset
2	KIB B	19,935,000.00	Objek Aset
3	KIB C	17,050,000.00	Objek Aset
4	KIB D		Objek Aset
5	KIB E		Objek Aset
	Jumlah	36,985,000.00	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 5.41 % . Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Praya Barat telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Beberapa pelaksanaan Kegiatan di kolaborasikan dengan instansi lain seperti pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Untuk kegiatan Pramusrenbang ada bantuan Anggaran dari Bapperida Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Pelaksanaan MTQ/STQ Kabupaten, ada bantuan anggaran dari Bagian KESRA SETDA Kabupaten Lombok Tengah.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Praya Barat dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 termasuk realisasi anggaran yang terdapat di Kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Praya Barat. Kelurahan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari OPD Kantor Camat, dan merupakan entitas dari kecamatan dimana Program dan Kegiatan Kelurahan tertuang dalam rencana kerja kecamatan dengan **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,574,790
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21,574,790

❖ KANTOR CAMAT PRAYA BARAT

- Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Praya Barat, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,616,536,582 dengan output kinerja yang diharapkan sebagai berikut :

Output	:	1	Renja, RKT
		2	RKA Kantor Camat Praya Barat
		3	RKPA Kantor Camat Praya Barat
		4	DPA Kantor Camat Praya Barat
		5	DPPA Kantor Camat Praya Barat
		6	Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja Tahunan
		7	LKjIP, LKPJ, LPPD
		8	Gaji dan Tunjangan
		9	Laporan Keuangan Akhir Tahun
		10	Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan
		11	Laporan Penatausahaan BMD
		12	Database Kepegawaian
		13	komponen Instalasi Listrik/Penerangan
		14	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya
		15	Tamu yang berkunjung
		16	Notulen Rapat Hasil Koordinasi dan Konsultasi
		17	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
		18	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
		19	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
		20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik yang disediakan
		21	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
		22	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
		23	Jumlah Laporan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait
		24	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

	25	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan
	26	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan
	27	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	28	jumlah Laporan Hasil Sinegisitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
	29	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	30	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	31	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	32	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	33	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	34	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa
	35	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
	36	Jumlah laporan Hasil koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya
Outcome :	1	Nilai SAKIP OPD
	2	Persentase Penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan
	3	Persentase usulan masyarakat yang disetujui
	4	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat
	5	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan
	6	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu

Realisasi :

- ✓ Keuangan sebesar Rp 2.517,928.005,- (96,23 %)
- ✓ Fisik 100 %.
- REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KANTOR CAMAT PRAYA BARAT TAHUN 2024

Adapun akuntabilitas keuangan pada Kantor Camat Praya Barat kami paparkan berdasarkan rincian DPA Kantor Camat Praya Barat yang didalamnya termuat anggaran dan realisasi keuangan Kantor Camat Praya Barat

Tabel 3.4.4
Anggaran dan realisasi
pelaksanaan program/kegiatan Kantor Camat Praya Barat Tahun 2024

Kode	SKPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	
			KEUANGAN	KEU (%)

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,036,135,944	1,953,665,355	95,95 %
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,661,900	18,156,650	97,29 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,860,400	1,842,900	99,06 %
	Belanja Operasi	9,450,000	1,842,900	19,50 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,500	330,000	94,96 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,512,900	1,512,900	100,00 %
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	557,500	512,500	91,93 %
	Belanja Operasi	557,500	512,500	91,93 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	347,500	302,500	87,05 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210,000	210,000	100,00 %
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,081,000	1,009,000	93,34 %
	Belanja Operasi	1,081,000	1,009,000	93,34 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	556,000	484,000	87,05 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525,000	525,000	100,00 %
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,428,500	1,366,750	95,68 %
	Belanja Operasi	1,428,500	1,366,750	95,68 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	903,500	841,750	93,17 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525,000	525,000	100,00 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,564,500	4,465,500	97,83 %
	Belanja Operasi	4,564,500	4,465,500	97,83 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	764,500	665,500	87,05 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,000	300,000	100,00 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,500,000	3,500,000	100,00 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400,000	400,000	100,00 %
	Belanja Operasi	400,000	400,000	100,00 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400,000	400,000	100,00 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,770,000	8,560,000	97,61 %
	Belanja Operasi	8,770,000	8,560,000	97,61 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,170,000	3,960,000	94,96 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	1,000,000	100,00 %

	-Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	100,00 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,067,940	65,362,140	85,93 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,266,220	12,259,500	99,95 %
	Belanja Operasi	12,266,220	12,259,500	99,95 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12,266,220	12,259,500	99,95 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,097,320	19,935,000	94,49 %
	Belanja Modal	21,097,320	19,935,000	94,49 %
	-Belanja modal pengadaan Komputer	21,097,320	19,935,000	94,49 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,588,400	21,549,200	99,82 %
	Belanja Operasi	21,588,400	21,549,200	99,82 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,450,000	20,450,000	100,00 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	778,400	739,200	94,96 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360,000	360,000	100,00 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,116,000	11,618,440	55,02 %
	Belanja Operasi	21,116,000	11,618,440	55,02 %
	-Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,616,000	7,118,440	42,84 %
	-Belanja Bimbingan Teknis	4,500,000	4,500,000	100,00 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,457,400	20,709,585	72,77 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,457,400	20,709,585	72,77 %
	Belanja Operasi	28,457,400	20,709,585	72,77 %
	-Belanja Tagihan Air	4,095,000	3,759,177	91,80 %
	-Belanja Tagihan Listrik	10,562,400	9,333,848	88,37 %
	-Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6,900,000	1,980,000	28,70 %
	-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,900,000	5,636,560	81,69 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,480,356	76,844,305	93,17 %
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64,601,204	58,966,905	91,28 %
	Belanja Operasi	64,601,204	58,966,905	91,28 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58,380,000	52,849,500	90,53 %
	-Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,721,204	2,617,405	96,19 %
	-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3,500,000	3,500,000	100,00 %

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,879,152	17,877,400	99,99 %
	Belanja Modal	17,879,152	17,877,400	99,99 %
	-Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17,051,530	17,050,000	99,99 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	827,622	827,400	99,97 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,830,468,348	1,772,592,675	96,84 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,762,909,524	1,705,264,575	96,73 %
	Belanja Operasi	1,874,667,882	1,705,264,575	90,96 %
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,874,267,882	1,705,264,575	90,98 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,625,900	4,460,500	96,42 %
	Belanja Operasi	4,625,900	4,460,500	96,42 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,668,000	1,502,600	90,08 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000	2,500,000	100,00 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	457,900	457,900	100,00 %
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62,932,924	62,867,600	99,90 %
	Belanja Operasi	62,932,924	62,867,600	99,90 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,790,400	15,727,800	99,60 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20,638,524	20,635,800	99,99 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,600,000	6,600,000	100,00 %
	-Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000	1,200,000	100,00 %
	-Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12,000,000	12,000,000	100,00 %
	-Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,814,000	2,814,000	100,00 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,000,000	2,000,000	100,00 %
	-Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,890,000	1,890,000	100,00 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,439,470	88,894,800	99,39 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,690,000	13,686,700	99,98 %
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,690,000	13,686,700	99,98 %
	Belanja Operasi	13,690,000	13,686,700	99,98 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,950,000	6,946,700	99,95 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,200,000	6,200,000	100,00 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			100,00 %

		540,000	540,000	%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75,749,470	75,208,100	99,29 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75,749,470	75,208,100	99,29 %
	Belanja Operasi	75,749,470	75,208,100	99,29 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17,569,600	17,512,400	99,67 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,250,000	29,250,000	100,00 %
	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14,400,000	14,400,000	100,00 %
	-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	317,880	317,880	100,00 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,809,870	13,325,700	96,49 %
	-Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	402,120	402,120	100,00 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,383,800	41,529,200	97,98 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42,383,800	41,529,200	97,98 %
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42,383,800	41,529,200	97,98 %
	Belanja Operasi	42,383,800	41,529,200	97,98 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23,352,000	22,498,200	96,34 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000	4,500,000	100,00 %
	-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12,000,000	12,000,000	100,00 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,531,800	2,531,000	99,97 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	388,249,818	374,157,200	96,37 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	388,249,818	374,157,200	96,37 %
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	388,249,818	374,157,200	96,37 %
	Belanja Operasi	388,249,818	374,157,200	96,37 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11,120,000	10,164,000	91,40 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,910,738	1,910,700	100,00 %
	-Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	62,298,480	60,108,000	96,48 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154,400,000	154,400,000	100,00 %
	-Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16,500,000	16,500,000	100,00 %
	-Belanja Jasa Tata Rias	11,598,300	11,520,000	99,32 %
	-Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22,636,668	21,868,500	96,61 %

	-Belanja Sosialisasi	26,400,000	26,400,000	100,00 %
	-Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33,600,000	24,000,000	71,43 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,309,872	7,290,000	99,73 %
	-Belanja Pakaian Paskibraka	40,475,760	39,996,000	98,81 %
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38,752,760	38,223,050	98,63 %
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38,752,760	38,223,050	98,63 %
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,727,960	12,446,500	97,79 %
	Belanja Operasi	12,727,960	12,446,500	97,79 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,560,000	5,280,000	94,96 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,727,960	1,726,500	99,92 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,440,000	5,440,000	100,00 %
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,853,000	12,716,750	98,94 %
	Belanja Operasi	12,853,000	12,716,750	98,94 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,725,000	4,598,750	97,33 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,288,000	4,278,000	99,77 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,840,000	3,840,000	100,00 %
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13,171,800	13,059,800	99,15 %
	Belanja Operasi	13,171,800	13,059,800	99,15 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,672,000	6,560,000	98,32 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,499,800	1,499,800	100,00 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	5,000,000	100,00 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,574,790	21,458,400	99,46 %
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21,574,790	21,458,400	99,46 %
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21,574,790	21,458,400	99,46 %
	Belanja Operasi	21,574,790	21,458,400	99,46 %
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,946,000	1,848,000	94,96 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,410,000	2,410,000	100,00 %
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,218,312	1,200,000	98,50 %
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,240,000	6,240,000	100,00 %
	-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	525,000	525,000	100,00 %

	-Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,955,478	1,955,400	100,00 %
	-Belanja Sosialisasi	7,280,000	7,280,000	100,00 %

Penyerapan anggaran belanja sesuai DPA Kantor Camat Praya Barat TA. 2024 sebesar Rp. 2.517.928.005,- atau sebesar 96.23 % dari total anggaran sebesar 2.616.536.582 Dengan melihat realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.5

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Rialisasi	%
1	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	200	185	92.50%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.036,135,944.00	1,953,665,355	95,95
1.1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	80	99%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,439,470.00	88,894,800	99,39
1.2	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang dan Mandiri di Kecamatan	75	75	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42,383,800.00	41,529,200	97,98
1.3	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum diwilayah desa	60	50	83.30%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	388,249,818.00	374,157,200	96,37
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38,752,760.00	38,223,050	98,63
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21,574,790.00	21,458,400	99,46
							2,616,536,582.00	2,517,928,005	96,23

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Secara umum Kantor Camat Praya Barat telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan berubahnya Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Barat sesuai dengan Renstra Kantor Camat Praya Barat Tahun Anggaran 2021 -2026, dengan Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Tujuan : “Nilai Kinerja Camat”;
 - ✓ Indikator Sasaran : “Indeks Kepuasan Masyarakat”
 - ✓ Indikator Sasaran : “Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan”
 - ✓ Indikator Sasaran : “Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/ Kelurahan”

Maka Kecamatan Praya Barat telah merubah semua dokumen yang berkaitan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Renstra 2021 -2026 sehingga semua Dokumen perencanaan untuk mengukur kinerja SKPD dapat terealisasi dengan baik.

Capaian Tujuan dan Sasaran pada tahun 2024 sudah bisa diukur secara keseluruhan, Nilai SAKIP Kecamatan akan dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Nilai Kinerja Camat diukur/dihitung oleh Bagian APU Setda Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan sudah bisa dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indikator Sasaran lainnya bisa dihitung berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data oleh Kecamatan. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Praya Barat Tahun 2024 ini dapat mewujudkan pelayanan menuju *good governant*

Praya Barat, Januari 2025

Plt. CAMAT PRAJA BARAT,

H. LALU SAMSUL RIJAL, S.IP
NIP. 197212312002121034

